# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Di Indonesia sendiri, kasus penyalahgunaan narkotika sangat mengkhawatirkan karena penggunaannya menyentuh berbagai kalangan, termasuk kalangan generasi muda. Terlebih setiap tahunnya jumlah pemakai penyalahgunaan narkotika semakin meningkat, oleh karena itu diperlukan penanganan dalam menanggulangi narkotika khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Kondisi tersebut menjadi perhatian untuk segenap instansi lembaga pemerintahan daerah dan peran masyarakat bersama. Peran lembaga terkait dan masyarakat sangat diperlukan dengan tujuan bersama untuk generasi emas Indonesia bebas narkotika.

Menurut Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat mencatat pada tahun 2024 ini terdapat 103 klien (pecandu narkotika) yang berasal dari Kota Padang dan semua Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan angka yang cukup tinggi yang menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya narkotika. 103 klien (pecandu narkotika) dari BNNP Sumbar itu terdiri dari 80 klien yang sudah *complete*. *Complete* disini ada beberapa macam, ada yang selesai secara tiba – tiba (hilang). Maksud klien hilang disini adalah klien hilang setelah menjalani hanya beberapa program rehabilitasi. *Drop out* atau keluar yaitu klien telah menyelesaikan semua program rehabilitasi, sedangkan tidak selesai program ini mempunyai makna klien tidak menyelesaikan program secara tuntas. 10 orang rawat inap, 10 orang pascarehabilitasi, dan 3 orang baru mendaftar diri ke BNNP Sumbar (Safitri, 2024).

Namun beberapa orang pecandu maupun pemakai narkotika yang telah menjalani rehabilitasi sebagian besar ada yang kembali kedalam kebiasaan lama mereka, yang mana mereka menjadikan narkotika menjadi sebagai sebuah pelarian atas penghukuman dirinya

UIN IMAM BONJOL PADANG

dimasyarakat, karena sebagian besar mereka tidak tahan atas stigma buruk masyarakat atas dirinya sebagai mantan pecandu atau pemakai narkotika.

Penyalahgunaan narkotika tidak terlepas dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini terlihat dalam pelaksanaan sanksi pidana. Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa sanksi, seperti sanksi pidana penjara, maupun sanksi pidana denda (Setiyawati,2015,15-16). Tidak hanya sanksi pidana yang termuat dalam UU No 35 Tahun 2009, namun ada juga kewajiban rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika yang termuat dalam Pasal 54 UU No 35 Tahun 2009. Rehabilitasi adalah serangkaian kegiatan yang merupakan proses pemulihan berkelanjutan yang ada tahap awal, rehabilitasi, dan ada tahap pascarehabilitasi (Safitri, 2024).

Rehabilitasi ini berkelanjutan atau berkesinambungan, bukan hanya rehabilitasi di BNNP saja, tetapi juga ada pemantauan kembali kepada klien, sejauh mana klien bisa bertahan pascarehabilitasi. BNNP Sumbar disini menjadi fasilitator dalam proses rehabilitasi pecandu narkotika. Pencandu narkotika mempunyai faktor pendorong untuk memakai narkotika, antara lain : lingkungan yang keras, kurang pengawasan orang tua, pergaulan yang buruk,dan ajang pelarian dari masalah (Safitri, 2024).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Permasalahan mengenai penyalahgunaan narkotika ini sulit dihindarkan dari masyarakat. Untuk itu, sebagai umat Islam dan pengikut Nabi Muhammad Saw, wajib mengikuti segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, seperti menjauhi narkotika dan sebagainya. Narkotika disini dikiaskan sama dengan minuman khamar karena sama-sama segala sesuatu zat yang dapat memabukkan dan membuat penggunanya hilang akal. Segala sesuatu zat yang dapat memabukan selain khamr, dalam penggunaannya adalah haram, karena penggunanya dapat kehilangan akal sementara. Maka jauhilah

perbuatan itu agar kita memperoleh kehidupan yang mulia di dunia dan meraih kenikmatan surga di akhirat. Dengan demikian, sudah selayaknya kepada seluruh orang tua dan aparatur pemerintah negara untuk memberikan pengawasan, pengontrolan secara ketat terhadap seluruh masyarakat agar tidak terjerumus narkotika (Rahman,2021, 3-4).

Dalam perspektif Islam, kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk menjaga kemaslahatan umum dikenal dengan konsep *siyasah syar'iyyah,* yaitu kebijakan publik yang dilandaskan pada prinsipprinsip syariat guna mewujudkan keadilan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. *Siyasah syar'iyyah* memberi ruang bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan strategis yang tidak secara eksplisit terdapat dalam nash, selama kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan nilainilai dasar Islam. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa setiap kebijakan yang bertujuan menegakkan keadilan dan menghilangkan kerusakan termasuk dalam *siyasah syar'iyyah*, sekalipun tidak memiliki dalil tekstual secara langsung dari Al-Qur'an atau hadis, tergolong dalam *siyasah syar'iyyah* (Ibnu Taimiyah,1995,13).

Salah satu prinsip utama dalam *siyasah syar'iyyah* adalah pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar,* yakni seruan kepada kebaikan dan pencegahan terhadap kemungkaran. Dalam konteks ini, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kerusakan, termasuk penyalahgunaan narkotika yang merupakan salah satu bentuk kemungkaran kontemporer. Oleh karena itu, upaya rehabilitasi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat terhadap para penyalahguna narkotika dapat dipahami sebagai bentuk konkret pelaksanaan *siyasah syar'iyyah* dalam kerangka *amar ma'ruf nahi munkar.* Rehabilitasi tersebut tidak hanya bernilai sebagai tindakan medis atau hukum semata, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam menyelamatkan

UIN IMAM BONJOL PADANG

manusia dari kerusakan akhlak, moral, dan sosial, yang sejalan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam (Az-zuhaili,1997,437).

Sebagai lembaga negara yang diberi mandat khusus dalam penanganan permasalahan narkotika, Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki tugas pokok meliputi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika di seluruh wilayah Indonesia. Khususnya di tingkat daerah, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat menjalankan tugas tersebut melalui berbagai program, seperti advokasi dan edukasi pencegahan, penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan narkotika, serta pelaksanaan rehabilitasi bagi para penyalahguna. Program rehabilitasi ini mencerminkan pendekatan humanis yang tidak hanya berfokus pada aspek pidana, tetapi juga mengedepankan pemulihan fisik, psikis, dan sosial bagi korban penyalahgunaan narkotika (Badan Narkotika Nasional, 2025,).

Dengan demikian, peran BNNP Sumatera Barat dalam menyelenggarakan program rehabilitasi dapat dikaji dari perspektif *siyasah syar'iyyah* sebagai bentuk nyata pelaksanaan tugas *amar ma'ruf nahi munkar* oleh negara. Melalui kebijakan rehabilitasi, pemerintah tidak hanya menjalankan tanggung jawab administratif, tetapi juga melaksanakan amanah syariat dalam menjaga masyarakat dari kerusakan moral, akal, dan kesehatan. Penanggulangan narkotika dengan pendekatan rehabilitatif merupakan bentuk perlindungan jiwa *(hifz al-nafs)* dan akal *(hifz al-'aql),* yang keduanya termasuk dalam lima tujuan utama *maqashid al-syariah*. Oleh karena itu, kebijakan rehabilitasi yang dilakukan oleh BNNP Sumbar tidak hanya relevan secara hukum positif, tetapi juga selaras dengan prinsipprinsip dasar dalam hukum Islam (Auda,2007,437).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membuat karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul **"Pelaksanaan**

UIN IMAM BONJOL PADANG

**Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat Perspektif *Siyasah Syar`Iyyah"***

## 1.2 Rumusan Masalah

Terkait pemaparan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut Bagaimana Tinjauan *Siyasah Syar'iyyah* Terhadap Rehabilitasi Pecandu Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat?

## 1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka pertanyaan penelitiannya adalah sebagai berikut :

1) Bagaimana tahap - tahap rehabilitasi pecandu narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat?
2) Bagaimana pengaruh rehabilitasi terhadap pecandu narkotika?
3) Bagaimana tinjauan *Siyasah Syar'iyyah* terhadap pelaksanaan rehabilitasi pecandu narkotika?

## 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas maka tujuan penelitian ini adalah

1) Untuk mengetahui tahap - tahap pelaksanaan rehabilitasi pecandu narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat.
2) Untuk mengetahui pengaruh rehabilitasi terhadap pecandu narkotika.
3) Untuk mengetahui tinjauan *Siyasah Syar'iyyah* terhadap pelaksanaan rehabilitasi pecandu narkotika**.**

## 1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan rehabilitasi narkotika yang dilakukan oleh BNNP Sumbar dari perspektif *Siyasah Syar'iyyah,* yang menghubungkan kebijakan negara dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini penting untuk memperkaya kajian mengenai integrasi antara hukum positif dan syariat Islam dalam penanggulangan narkotika, serta memberikan

UIN IMAM BONJOL PADANG

perspektif baru dalam praktik kebijakan rehabilitasi di Indonesia yang selama ini lebih berfokus pada pendekatan medis dan hukum positif. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi BNNP Sumbar untuk mengembangkan program rehabilitasi yang tidak hanya memperhatikan aspek medis, tetapi juga mencakup dimensi spiritual yang sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, kebijakan rehabilitasi narkotika dapat lebih efektif dalam memulihkan individu secara menyeluruh, baik secara fisik, mental, maupun spiritual, serta mendukung pemulihan sosial yang lebih baik bagi masyarakat.

## 1.6 Kerangka Teori

### 1.6.1 Rehabilitasi

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan rehabilitasi sebagai pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu, misalnya pasien rumah sakit, korban bencana supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat di masyarakat. Rehabilitasi adalah serangkaian kegiatan yang merupakan proses pemulihan berkelanjutan yang terdiri dari 2 tahapan yaitu tahap awal rehabilitasi dan tahap pascarehabilitasi.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Rehabilitasi berkelanjutan ini berkesinambungan, bukan hanya rehabilitasi di BNNP saja tapi ada juga pemantauan kembali kepada klien sejauh mana dia bisa bertahan untuk tidak mengulangi kebiasaan pasca rehabilitasi (Safitri, 2024). Pasal 54 UU No 35 Tahun 2009 atau UU Narkotika,mengatur bahwa setiap pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi. Peran rehabilitasi dalam penyembuhan ketergantungan bagi pecandu narkotika sangat penting, karena semakin bertambahnya pecandu narkotika.

Efektifitas rehabilitasi untuk menyembuhkan pelaku penyalahguna dari narkotika sangat diperlukan, mengingat sulitnya korban atau pengguna narkotika untuk dapat terlepas dari ketergantungan

narkotika secara individu. Macam–macam rehabilitasi pecandu narkotika dari BNNP Sumatera Barat:

1) Rehabilitasi rawat inap (pecandu narkotika berat)
2) Rehabilitasi rawat jalan (pecandu ringan - sedang)
3) Intervensi berbasis masyarakat (pecandu coba pakai) (Safitri, 2024).

### 1.6.2 *Siyasah Syari'yyah*

Siyasah syar'iyyah merupakan konsep penting dalam sistem pemerintahan Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat melalui kebijakan yang tidak bertentangan dengan prinsipprinsip syariat. Konsep ini memberikan ruang bagi otoritas negara untuk menetapkan kebijakan publik yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam nash, selama kebijakan tersebut tetap sejalan dengan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan terhadap tujuantujuan syariat. Ibn Taimiyyah menyatakan bahwa setiap kebijakan yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi rakyat dan tidak menyelisihi syariat dapat digolongkan ke dalam siyasah syar'iyyah (Taimiyyah,2005,14).

Dalam Islam, perintah untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran dikenal dengan konsep *amar ma'ruf nahi munkar*. Prinsip ini merupakan tanggung jawab kolektif umat, yang tidak hanya diwujudkan secara personal, tetapi juga menjadi dasar dalam sistem pemerintahan Islam. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa umat Islam adalah sebaik-baik umat karena menjalankan tugas *amar ma'ruf nahi munkar,* sebagaimana termaktub dalam Q.S. Ali Imran ayat 110 (Depag RI,2019). *Amar ma'ruf nahi munkar* dan *siyasah syar'iyyah* memiliki keterkaitan yang sangat erat, di mana keduanya berperan dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan bermartabat. *Siyasah syar'iyyah* berfungsi sebagai alat untuk merealisasikan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* secara sistematis dan terstruktur dalam bentuk kebijakankebijakan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi,

UIN IMAM BONJOL PADANG

dan moral masyarakat. Melalui *siyasah syar'iyyah,* pemerintah dapat mengimplementasikan perintah agama dalam bentuk undang-undang dan kebijakan yang bertujuan mencegah kerusakan serta menegakkan keadilan sosial (Al-Buthi,1992,245).

Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, *siyasah syar'iyyah* dan *amar ma'ruf nahi munkar* memandang pecandu atau pengguna narkotika sebagai individu yang sedang berada dalam kondisi kerusakan moral dan fisik yang serius. Narkotika dianggap sebagai bentuk kemungkaran karena merusak akal dan jiwa, dua hal yang dilindungi dalam *maqashid alsyari'ah.* Dalam Islam, akal merupakan instrumen utama manusia untuk menerima beban taklif (tanggung jawab hukum), sehingga menjaga akal menjadi bagian penting dari syariat. Oleh karena itu, penanganan terhadap pecandu narkotika tidak cukup dengan pendekatan hukum semata, tetapi juga harus disertai dengan pendekatan rehabilitatif yang memberikan ruang perbaikan dan pemulihaan (Az-zuhaili, 1997,90).

Kebijakan rehabilitasi narkotika merupakan bentuk konkret pelaksanaan *siyasah syar'iyyah* dan penerapan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* dalam menangani persoalan sosial. Rehabilitasi tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pemulihan kesehatan fisik dan mental bagi pecandu, tetapi juga sebagai upaya moral untuk mengembalikan mereka kepada kehidupan yang produktif dan beriman. Melalui pendekatan ini, negara tidak hanya menindak, tetapi juga mendidik dan memulihkan, sebagaimana nilai-nilai Islam yang menganjurkan kasih sayang dan perbaikan. Kebijakan ini mencerminkan pendekatan nahi munkar yang tidak semata-mata represif, melainkan korektif dan konstruktif, sejalan dengan tujuan utama *siyasah syar'iyyah* dalam mewujudkan kemaslahatan umat (Auda,2007,112).

UIN IMAM BONJOL PADANG

## 1.7 Studi Literatur

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan ditemukan beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya adalah:

Penelitian yang dilakukan oleh Elisa Putri NIM 1912020067 dari Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Imam Bonjol Padang, berjudul *"Pelaksanaan Bimbingan Spiritual dalam Mengatasi Kekambuhan pada Residen di Panti Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba Yayasan Pelita Jiwa Insani Kota Padang"* pada tahun 2023, membahas tentang upaya pencegahan kekambuhan penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan *spiritual.* Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field research)* dengan pendekatan deskriptif kualitatif, menggunakan teknik observasi dan wawancara untuk memperoleh data. Fokus utama penelitian ini adalah pelaksanaan bimbingan spiritual kepada residen yang sedang menjalani rehabilitasi, yang mencakup materi tentang akidah, ibadah, dan akhlak, serta menggunakan metode langsung, tidak langsung, wawancara, dan kelompok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun bimbingan *spiritual* telah diberikan, masih ada residen yang mengikuti kegiatan keagamaan hanya karena terpaksa, bukan karena kesadaran pribadi, sehingga tujuan untuk mengatasi kekambuhan belum sepenuhnya tercapai. Penelitian ini memiliki persamaan dengan skripsi penulis, yakni sama-sama membahas proses pemulihan pecandu narkotika selama rehabilitasi. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan dan objek kajian. Penelitian Elisa lebih menyoroti aspek spiritual dalam mencegah kekambuhan di lembaga rehabilitasi sosial non-pemerintah, sedangkan skripsi penulis mengkaji pelaksanaan rehabilitasi secara lebih menyeluruh di bawah lembaga negara, yaitu BNNP Sumatera Barat, dan ditinjau dari perspektif *siyasah syar'iyyah,* yang menekankan pentingnya peran

UIN IMAM BONJOL PADANG

negara dalam membina, memulihkan, dan melindungi rakyatnya dari bahaya narkotika sebagai bagian dari tanggung jawab *syar'i.*

Penelitian yang dilakukan oleh Novi Sri Wahyuni NIM 1712040045 dari Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Imam Bonjol Padang, dengan judul *"Pemberdayaan Mantan Pecandu Narkoba di Panti Rehabilitasi Sahabat Suci Hati Kota Padang"* pada tahun 2022, membahas tentang proses pemberdayaan yang dilakukan terhadap mantan pecandu narkoba pasca-rehabilitasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui teknik wawancara dan dokumentasi, serta metode snowball sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa panti tersebut melakukan pembinaan berupa pemulihan harga diri, penguatan nilainilai sosial, serta pencerahan spiritual agar mantan pecandu dapat kembali diterima di tengah masyarakat. Hambatan utama dalam proses ini adalah rendahnya kepercayaan diri mantan pecandu dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial, termasuk dengan para pendamping. Penelitian ini memiliki persamaan dengan skripsi penulis, yaitu sama-sama menyoroti proses pemulihan pecandu narkotika dan bagaimana mereka kembali menjalankan perannya dalam masyarakat. Namun, perbedaannya terletak pada lokasi dan pendekatannya. Penelitian Novi berfokus pada lembaga rehabilitasi nonpemerintah dengan sudut pandang sosial-pemberdayaan, sementara skripsi ini menganalisis pelaksanaan rehabilitasi oleh BNNP Provinsi Sumatera Barat dari sudut pandang *siyasah syar'iyyah,* yang menekankan peran negara dalam menjaga kemaslahatan umat dan memulihkan penyalahguna narkotika sebagai bagian dari tanggung jawab *syar'i.*

Penelitian yang dilakukan oleh Seprima Handita Sari NIM 1312020131, mahasiswa Jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Imam Bonjol Padang, berjudul *"Pengaruh Rehabilitasi terhadap Perubahan Perilaku Narapidana*

UIN IMAM BONJOL PADANG

*Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang"* pada tahun 2018, membahas efektivitas rehabilitasi dalam mengubah perilaku narapidana pengguna narkoba. Dengan pendekatan kuantitatif deskriptif dan analisis regresi linear sederhana, penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi berada pada kategori sedang, dengan 70% responden menyatakan cukup berpengaruh terhadap perubahan perilaku. Persamaannya dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika, namun perbedaannya terletak pada pendekatan dan sudut pandang. Penelitian Seprima lebih menitikberatkan pada pengaruh statistik terhadap perubahan perilaku di lapas, sedangkan skripsi penulis mengkaji pelaksanaan rehabilitasi oleh BNNP Sumatera Barat dari perspektif *siyasah syar'iyyah*, yang menilai tanggung jawab negara dalam menyelamatkan akal dan kehidupan masyarakat dari bahaya narkotika.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Silvia Fitri dan Rahmadani Yusran berjudul *"Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Pengguna Narkoba pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat"*, diterbitkan dalam *Journal of Civic Education* Volume 3 No. 3 Tahun 2020, menjadi salah satu rujukan penting dalam studi literatur skripsi ini. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan rehabilitasi bagi pengguna narkotika yang dilakukan oleh BNNP Sumatera Barat sesuai dengan amanat UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam hasil penelitiannya, ditemukan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan optimal karena berbagai faktor penghambat, seperti proses komunikasi yang kurang efektif dalam sosialisasi kebijakan, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta belum tersedianya fasilitas rehabilitasi rawat inap di lingkungan BNNP. Penelitian ini juga menguraikan secara rinci pelaksanaan rehabilitasi dalam tiga bentuk: rawat jalan, rawat inap (melalui kerja sama dengan

UIN IMAM BONJOL PADANG

rumah sakit mitra), dan pascarehabilitasi yang dilakukan melalui rumah damping dan pelatihan keterampilan. Persamaan dengan skripsi ini terletak pada objek dan fokus kajian, yaitu pelaksanaan rehabilitasi narkotika oleh BNNP Sumatera Barat, termasuk tahapan-tahapan rehabilitasi yang dikaji secara deskriptif. Namun, perbedaan mendasar terletak pada pendekatan yang digunakan. Jika penelitian Silvia dan Rahmadani memakai perspektif implementasi kebijakan publik dan model teori *George C. Edward* III, maka dalam skripsi ini penulis menggunakan pendekatan *siyasah syar'iyyah* yang menilai kebijakan rehabilitasi tidak hanya dari sisi administratif, tetapi juga dari sudut tanggung jawab negara dalam menegakkan prinsip-prinsip Islam, khususnya dalam menjaga moral dan akal masyarakat dari kerusakan akibat narkotika.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Saefulloh berjudul *"Muhasabah sebagai Upaya Rehabilitasi Eks-Pecandu Narkoba di Yayasan Suci Hati Padang"* yang dimuat dalam jurnal *Nidhomul Haq*, Volume 3, Nomor 1, Maret 2018 (ISSN 2503-1481), membahas tentang efektivitas pendekatan muhasabah dalam proses rehabilitasi pecandu narkoba. Metode muhasabah yang dimaksud merupakan bentuk introspeksi spiritual melalui renungan dan penguatan nilai keimanan yang dilakukan secara rutin oleh Yayasan Suci Hati sebagai bagian dari terapi keagamaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu membentuk kesadaran diri serta perubahan perilaku positif pada eks-pecandu narkoba. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang memungkinkan penyembuhan pecandu melalui pendekatan keagamaan. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu samasama mengangkat tema rehabilitasi penyalah guna narkotika di Sumatera Barat dan sama-sama menekankan pentingnya pendekatan keislaman. Namun, terdapat perbedaan dari sisi lembaga yang dikaji, di mana penelitian Saefulloh menyoroti lembaga

UIN IMAM BONJOL PADANG

nonpemerintah (Yayasan Suci Hati), sedangkan penelitian penulis fokus pada lembaga pemerintah yaitu Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat. Selain itu, penelitian Saefulloh menitikberatkan pada metode *muhasabah* sebagai pendekatan tunggal, sementara penelitian penulis membahas keseluruhan tahapan rehabilitasi secara sistematis dalam perspektif *siyasah syar'iyyah* yang tidak menjadi fokus dalam penelitian sebelumnya.

## 1.8 Metode Penelitian

### 1.8.1 Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi pada masa sekarang berdasarkan gambaran yang dilihat dan didengar dari hasil penelitian baik di lapangan atau teori berupa datadata dan buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan. Metode ini bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai faktafakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Metode penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif yang dijelaskan dengan kata-kata bukan dengan angka (Raco,2010,4).

UIN IMAM BONJOL PADANG

### 1.8.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* yaitu penelitian lapangan dengan teknik wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait yang berhubungan langsung dengan masalah yang penulis bahas. Penelitian *field research* ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan logika induktif, dibangun berdasarkan pada hal-hal khusus atau data di lapangan dan bermuara pada hal-hal umum (Bungin, 2007, 65).

### 1.8.3 Sumber Data

Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

### 1.8.3.1 Sumber data primer

Sumber data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli yang dalam hal ini diperoleh atau dikumpulkan dari lapangan yang didapat dari informan atau narasumber yang dianggap mengetahui serta dapat dipercaya untuk menjadi sumber data melalui wawancara (Fauziana, 2017,42). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pihak BNNP Sumatera Barat.

### 1.8.3.2 Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Data tersebut diperoleh dari perpustakaan, dokumen, buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan ilmiah, catatan kuliah dan sumber-sumber tertulis yang berkaitan lainnya (Fauziana, 2017,42). Sumber data sekunder dari proposal ini adalah bahan bacaan yang telah ada yang berkaitan dengan rehabilitasi pecandu narkotika yang di lakukan oleh BNN.

### 1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memiliki 3 teknik pengumpulan data yaitu :

### 1.8.4.1 Wawancara

Wawancara yaitu merupakan sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara kepada narasumber atau informan. Jenis wawancara yang penelitian gunakan adalah wawancara terstruktur. Wawancara yang sudah terstruktur dengan sejumlah pertanyaan yang sudah disiapkan sebelum melakukan sesi wawancara (Sahir,2021,46). Wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara langsung dengan pihak BNNP Sumatera Barat yaitu Rani sebagai psikiater, dan wawancara dengan keluarga *client* yaitu Yeni sebagai kakak sepupu *client*, beserta dengan masyarakat tempat tinggal penyalahguna yang bernama Keni .

UIN IMAM BONJOL PADANG

### 1.8.4.2 Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan peneliti turun langsung ke lapangan, kemudian mengamati gejala yang sedang diteliti (Sahir,2021,30). Peneliti melakukan observasi terhadap pelaksanaan rehabilitasi pecandu narkotika di BNNP Sumatera Barat pada saat peneliti melakukan penelitian di BNNP Sumatera Barat yaitu peneliti melihat secara langsung orang yang datang ke BNNP untuk melakukan rehabilitasi. Peniliti melakukan observasi di BNNP Sumbar selama lebih kurang 1 minggu waktu kerja. Dalam observasi peneliti mendapatkan bagaimana tahapan rehabilitasi yang dilakukan oleh BNNP Sumbar dalam menangani penyalahguna narkotika.

### 1.8.4.3 Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono,2015,39). Penelitian ini melakukan dokumentasi sebagai pelengkap dari metode wawancara dan observasi, yaitu foto dari wawancara, dan foto poster dari layanan wajib lapor BNN.

UIN IMAM BONJOL
PADANG